FENOMENA KEMISKINAN DAN PERDAGANGAN PASAR GELAP DI PERBATASAN INDONESIA–TIMOR LESTE

Anton Petrus Welland Nomleni[1], Daniel D. Kameo[2]
Program Studi S3 Studi Pembangunan Fakultas Interdisiplin
Universitas Satya Wacana Christian
e-mail: nomlenianton@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peluang dan tantangan ekonomi yang dihadapi keluarga di wilayah perbatasan Indonesia–Republik Demokratik Timor-Leste (RDTL), khususnya di titik-titik penyelundupan pasar gelap. Metode yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif, di mana data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang memahami dinamika ekonomi dan sosial di kawasan perbatasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa maraknya aktivitas perdagangan ilegal mencerminkan ketidakmampuan pemerintah dalam menyediakan kesejahteraan dan akses ekonomi yang memadai bagi masyarakat perbatasan. Regulasi yang dianggap membatasi justru mempersempit ruang ekonomi warga, sehingga banyak keluarga memilih jalur perdagangan tersembunyi sebagai strategi bertahan hidup. Penelitian ini berkontribusi secara teoretis dalam memahami praktik ekonomi informal di wilayah perbatasan sebagai bentuk adaptasi sekaligus perlawanan terhadap kebijakan negara yang tidak berpihak. Temuan ini juga memberikan implikasi penting bagi perumusan kebijakan ekonomi yang lebih inklusif dan kontekstual di kawasan perbatasan.

Kata Kunci: Ketahanan ekonomi, penyelundupan, pasar gelap, perbatasan Indonesia, keluarga

ABSTRACT

This study aims to analyze the economic opportunities and challenges faced by families living along the Indonesia–Democratic Republic of Timor-Leste (RDTL) border, particularly at points of cross-border smuggling and black-market trade. The research employs a qualitative case study approach, with data collected through in-depth interviews involving informants familiar with the economic and social dynamics of the border region. The findings reveal that the persistence of illegal trade reflects the government's inability to ensure adequate welfare and economic access for border communities. Restrictive regulations have limited local economic activity, prompting many families to engage in clandestine trade as a survival strategy. This study contributes theoretically by interpreting informal border economies as both adaptive mechanisms and acts of resistance against unfavorable state

Repositori Institusi | Universitas Kristen Satya Wacana
repository.uksw.edu

policies. The findings offer valuable insights for developing more inclusive and context-sensitive economic policies in border areas.

Keywords: Economic resilience, smuggling, black market, Indonesia border, family

PENDAHULUAN

Permasalahan kemiskinan di wilayah perbatasan Indonesia–Timor Leste merupakan isu multidimensi yang telah berlangsung lama dan cenderung terabaikan dalam perhatian kebijakan nasional. Keterbatasan infrastruktur, minimnya akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta sempitnya peluang kerja formal memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat di kawasan ini. Sebagian besar penduduk hidup di bawah garis kemiskinan, sehingga mereka menempuh berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan dasar. Salah satu bentuk adaptasi yang menonjol ialah keterlibatan masyarakat dalam aktivitas perdagangan lintas batas ilegal atau pasar gelap.

Perdagangan gelap ini mencakup berbagai komoditas, mulai dari bahan kebutuhan pokok hingga barang elektronik, yang melintasi perbatasan tanpa melalui mekanisme resmi perdagangan internasional. Meskipun berisiko tinggi dan melanggar hukum, aktivitas ini sering dianggap sebagai solusi pragmatis untuk memperbaiki taraf hidup. Bagi masyarakat lokal, perdagangan ilegal memberikan akses terhadap barang dengan harga lebih murah dan membuka peluang memperoleh penghasilan tambahan. Fenomena ini bukan hanya mencerminkan daya adaptasi masyarakat perbatasan terhadap kondisi ekonomi yang menekan, tetapi juga memperlihatkan kelemahan sistem ekonomi dan hukum di kawasan tersebut. Ketidakmampuan pemerintah menyediakan peluang ekonomi yang layak mendorong masyarakat mencari jalan alternatif meskipun berisiko, karena jalur perdagangan gelap dianggap memberi secercah harapan untuk kehidupan yang lebih baik.

Mengkaji perdagangan pasar gelap di perbatasan Indonesia–Timor Leste memerlukan pendekatan interdisipliner yang mencakup perspektif ekonomi, sosial, dan politik. Dari sisi ekonomi, aktivitas ini dapat dilihat sebagai bentuk rasionalitas ekonomi dalam kondisi terbatas. Infrastruktur yang minim, akses yang sulit terhadap sumber daya, dan terbatasnya lapangan kerja formal membuat masyarakat mencari alternatif penghidupan yang lebih menguntungkan. Meskipun kegiatan tersebut menimbulkan dilema moral dan hukum, bagi banyak keluarga di perbatasan, perdagangan ilegal merupakan strategi bertahan hidup agar kebutuhan dasar tetap terpenuhi.

Repositori Institusi | Universitas Kristen Satya Wacana
repository.uksw.edu

Secara sosial, perdagangan pasar gelap mencerminkan kemampuan komunitas lokal beradaptasi terhadap ketimpangan dan eksklusi struktural. Penduduk perbatasan seringkali terpinggirkan dari kebijakan pembangunan nasional sehingga membentuk jaringan sosial berbasis solidaritas dan kerja sama. Jaringan ini bukan hanya berfungsi sebagai wadah transaksi ekonomi, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan dan dukungan sosial. Solidaritas yang terbangun di antara pelaku perdagangan memperkuat kohesi sosial dan rasa saling percaya, memungkinkan mereka saling membantu menghadapi risiko dan tekanan ekonomi.

Dari perspektif politik, aktivitas perdagangan ilegal di wilayah perbatasan memperlihatkan ketegangan akibat lemahnya kebijakan pengelolaan perbatasan yang sering bersifat represif dan tidak kontekstual. Pemerintah di kedua sisi perbatasan menghadapi tantangan besar dalam mengontrol aktivitas lintas batas, terutama karena keterbatasan sumber daya dan maraknya praktik korupsi. Kebijakan yang tidak mempertimbangkan kondisi sosio-kultural masyarakat perbatasan sering menimbulkan ketidakpuasan dan resistensi terhadap otoritas negara. Akibatnya, kekosongan peran negara di wilayah ini dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk mengembangkan jaringan perdagangan ilegal.

Selain faktor domestik, dinamika hubungan internasional antara Indonesia dan Timor Leste turut memengaruhi maraknya perdagangan gelap. Sejarah panjang konflik dan ketegangan politik kedua negara masih meninggalkan dampak psikologis dan struktural di kawasan perbatasan. Hubungan bilateral yang belum sepenuhnya stabil serta perbedaan kebijakan dan penegakan hukum di kedua negara membuka ruang bagi aktivitas ilegal untuk terus berlangsung.

Beberapa penelitian terdahulu memberikan kerangka teoretis yang relevan untuk memahami fenomena ini. Misalnya, Nchake et al. (2019) meneliti perbatasan Afrika Selatan–Lesotho dan menemukan bahwa perbedaan kebijakan antarnegara masih menjadi hambatan arus perdagangan dan kompetisi harga meskipun keduanya tergabung dalam serikat pabean. Sementara itu, Wilson (2023) meneliti perbatasan Amerika Serikat dan menemukan bahwa wilayah perbatasan mengalami penyesuaian pasar tenaga kerja yang lebih lambat akibat rendahnya mobilitas penduduk pasca guncangan ekonomi. Penelitian Benjamin et al. (2015) di Afrika Barat menunjukkan bahwa perbedaan kebijakan perdagangan dan tingginya mobilitas barang serta manusia antarnegara menyebabkan penyelundupan berkembang pesat, di mana barang diimpor secara legal di negara bertarif rendah dan kemudian diekspor kembali secara ilegal ke negara bertarif tinggi.

Repositori Institusi | Universitas Kristen Satya Wacana
repository.uksw.edu

Berangkat dari temuan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peluang dan tantangan ekonomi yang dihadapi keluarga-keluarga di titik-titik penyelundupan di perbatasan Indonesia–Timor Leste. Kawasan ini ditandai oleh keterbatasan infrastruktur, rendahnya akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta minimnya kesempatan kerja formal. Dalam kondisi tersebut, perdagangan ilegal menjadi pilihan bertahan hidup bagi sebagian besar keluarga meskipun berisiko terhadap keamanan dan hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai dampak ekonomi dan sosial dari aktivitas perdagangan gelap di perbatasan, sekaligus menjadi dasar bagi perumusan kebijakan yang lebih adaptif dan kontekstual terhadap kondisi masyarakat lokal.

Dengan merujuk pada berbagai penelitian terdahulu, studi ini berupaya mengisi kekosongan literatur terkait dinamika ekonomi di wilayah perbatasan negara. Hasilnya diharapkan dapat memperkaya kajian tentang bagaimana keterbatasan struktural dan kebijakan ekonomi nasional membentuk strategi bertahan hidup masyarakat perbatasan dalam menghadapi tekanan kemiskinan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan paradigma konstruktivisme sebagai landasan utama dalam memahami dan menganalisis peluang serta tantangan ekonomi yang dihadapi keluarga di titik-titik penyelundupan pasar gelap di wilayah perbatasan. Fokus penelitian diarahkan pada tiga kawasan perbatasan antara Indonesia dan Timor-Leste di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, dan Kabupaten Timor Tengah Utara.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan informan yang dipilih menggunakan pendekatan inklusif. Pendekatan ini bertujuan agar informan dapat mengemukakan pandangan dan pengalaman mereka secara bebas terkait dinamika peluang serta tantangan perdagangan pasar gelap di wilayah perbatasan. Pemilihan partisipan dilakukan secara purposive, dengan mempertimbangkan aspek usia, latar belakang pendidikan, jenis komoditas perdagangan, serta pengalaman mereka dalam aktivitas perdagangan lintas batas Indonesia–Timor-Leste.

Selain wawancara, penelitian ini juga memanfaatkan observasi non-partisipan dan dokumentasi lapangan sebagai metode pelengkap untuk memperkuat hasil analisis. Dalam observasi non-partisipan, peneliti tidak terlibat langsung dalam aktivitas perdagangan ilegal, melainkan berperan sebagai

Repositori Institusi | Universitas Kristen Satya Wacana
repository.uksw.edu

pengamat yang mencatat dinamika di lapangan berdasarkan pengalaman dan narasi partisipan tanpa memengaruhi jalannya kegiatan (Creswell, 2016).

Data yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut dianalisis menggunakan pendekatan analisis kualitatif, melalui tahapan pengkodean, pengelompokan tema, serta penarikan kesimpulan berdasarkan pola dan temuan yang muncul dari data lapangan. Proses analisis dilakukan secara iteratif, berulang, dan berkesinambungan melalui langkah perbandingan, konfirmasi, serta validasi temuan bersama partisipan untuk memastikan keabsahan dan keandalan hasil penelitian (Miles & Huberman, 2014).

Aspek etika penelitian menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan studi ini. Peneliti menjunjung tinggi prinsip privasi, kerahasiaan, dan persetujuan sukarela dari setiap informan. Partisipan diberikan penjelasan secara menyeluruh mengenai tujuan penelitian, prosedur, serta hak-hak mereka, dan hanya mereka yang memberikan persetujuan tertulis (*informed consent*) yang dilibatkan dalam kegiatan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Perdagangan Ilegal Masyarakat di Perbatasan Timor Leste

Timor-Leste, yang sebelumnya merupakan bagian dari Indonesia, resmi menjadi negara berdaulat pada Mei 2002. Proses menuju kemerdekaan tersebut diwarnai oleh berbagai tantangan, terutama rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat pasca lepas dari Indonesia. Kondisi ini mencerminkan keterbatasan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar warganya, sehingga memunculkan berbagai bentuk adaptasi sosial-ekonomi, termasuk praktik perdagangan ilegal di wilayah perbatasan.

Hal ini diperkuat melalui wawancara dengan salah seorang warga perbatasan yang mengungkapkan bahwa setelah Timor-Leste merdeka pada 1999–2002, terjadi krisis ekonomi dan pangan yang signifikan. Dalam situasi tersebut, masyarakat Indonesia di wilayah perbatasan berperan penting sebagai pemasok kebutuhan dasar bagi warga Timor-Leste. Pernyataan ini menunjukkan bahwa krisis ekonomi pascakemerdekaan mendorong masyarakat untuk mencari alternatif pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas lintas batas nonformal.

Kondisi tersebut menciptakan peluang bagi masyarakat di kedua sisi perbatasan untuk memanfaatkan mobilitas barang dan jasa secara tidak resmi. Keuntungan yang diperoleh dari perdagangan tersebut menjadi sumber penghidupan utama dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan keluarga, meskipun dilakukan di luar jalur legal.

Repositori Institusi | Universitas Kristen Satya Wacana repository.uksw.edu

Secara umum, kawasan perbatasan antarnegara memiliki karakteristik dan permasalahan yang kompleks. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mengidentifikasi enam faktor utama penyebab kerentanan di wilayah perbatasan: (1) kebijakan pembangunan yang belum berpihak pada daerah tertinggal; (2) kesenjangan ekonomi dan sosial-budaya yang tinggi; (3) lemahnya pertahanan dan keamanan akibat belum tuntasnya penetapan batas wilayah; (4) pemanfaatan sumber daya alam yang belum optimal; (5) belum adanya kelembagaan terpadu dalam pengelolaan kawasan perbatasan; dan (6) kerja sama antarnegara yang belum efektif dalam penegakan hukum dan pengawasan lintas batas.

Dalam konteks tersebut, masyarakat di perbatasan Indonesia–Timor-Leste menjadikan perdagangan ilegal sebagai strategi bertahan hidup. Aktivitas ini umumnya mencakup pertukaran bahan kebutuhan pokok, serta perdagangan minyak tanah dan bensin. Beberapa mekanisme yang digunakan masyarakat dalam menjalankan aktivitas tersebut antara lain:

Pertama, penggunaan sistem barter. Mekanisme pertukaran barang tanpa uang masih dipraktikkan karena adanya tiga sistem mata uang yang berbeda di wilayah tersebut—Rupiah, Sentafo, dan Dolar AS—yang menyulitkan transaksi tunai. Barter dianggap sebagai solusi praktis dan efisien dalam situasi ekonomi lintas negara yang terbatas.

Menariknya, sebagian masyarakat mengaitkan kegiatan barter ini dengan ritual adat untuk mengelabui aparat keamanan. Barang-barang yang diperdagangkan sering kali diklaim sebagai bagian dari kegiatan adat, sehingga tidak dicurigai sebagai hasil transaksi ilegal. Tindakan ini menunjukkan adanya strategi kultural yang digunakan masyarakat untuk melindungi diri dari kontrol negara yang ketat terhadap aktivitas perdagangan.

Kedua, transaksi menggunakan uang tunai dilakukan di jalur pantai menggunakan perahu kecil. Dalam satu kali pengiriman, para pedagang dapat membawa hingga 18 jeriken barang, dengan keuntungan yang cukup signifikan. Aktivitas ini terbukti mampu meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat, meskipun berada di luar mekanisme perdagangan resmi.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa regulasi ekonomi yang terlalu ketat justru dapat menimbulkan resistensi dan mendorong tumbuhnya ekonomi informal. Seperti dikemukakan Benjamin et al. (2015), kebijakan perdagangan yang restriktif di negara berkembang sering kali memicu perluasan pasar gelap sebagai alternatif distribusi barang. Hal serupa ditegaskan Wilson (2023), bahwa kompleksitas regulasi dan beban pajak tinggi memperlambat dinamika ekonomi di wilayah perbatasan. Ulyssea (2020) juga menyebutkan bahwa sistem formal

Repositori Institusi | Universitas Kristen Satya Wacana
repository.uksw.edu

yang menuntut kewajiban pajak tinggi sulit dijangkau oleh pelaku usaha kecil di sektor informal.

Sementara itu, setiap negara idealnya mengembangkan kerja sama dan kebijakan perdagangan yang adil, termasuk pengawasan terhadap bea dan cukai (Kanda & Nuraeni, 2020). Dalam konteks hukum perdagangan, bea merupakan pungutan terhadap barang yang diimpor atau diekspor, sedangkan cukai dikenakan terhadap barang tertentu yang peredarannya diawasi dan dikendalikan karena bernilai tinggi (Haqiqi et al., 2021). Namun, sistem tersebut sulit diterapkan bagi masyarakat di daerah perbatasan yang masih berjuang memenuhi kebutuhan hidup dasar. Oleh karena itu, pilihan masyarakat untuk menjalankan jalur perdagangan nonformal menjadi bentuk adaptasi terhadap keterbatasan struktural dan kebijakan ekonomi yang belum berpihak kepada mereka.

Dengan demikian, praktik perdagangan ilegal di perbatasan bukan semata bentuk pelanggaran hukum, tetapi juga manifestasi dari strategi bertahan hidup dalam menghadapi tekanan ekonomi dan ketimpangan kebijakan negara.

Urgensi Perdagangan Ilegal pada Masyarakat Perbatasan

Wilayah perbatasan memiliki posisi strategis dan vital, terutama dalam tiga aspek utama: pertahanan-keamanan, ekonomi-perdagangan, serta sosial-budaya (Sudiar et al., 2023). Dari sisi pertahanan-keamanan, kawasan ini menjadi wilayah rawan karena dapat menjadi pintu masuk bagi kejahatan transnasional seperti terorisme, perdagangan manusia, narkotika, pembalakan liar, hingga penyelundupan senjata (Prayoga, 2022). Oleh karena itu, pengawasan yang ketat diperlukan untuk menjaga stabilitas nasional. Dari sudut pandang ekonomi, kawasan perbatasan berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional yang potensial. Akses keluar-masuk barang di wilayah ini dapat mendorong peningkatan aktivitas perdagangan, pendapatan masyarakat, dan kesejahteraan ekonomi (Yosada, 2020). Adapun dari sisi sosial-budaya, masyarakat di perbatasan umumnya memiliki kesamaan etnis dan kekerabatan yang kuat (Kareth, 2022), menjadikan interaksi lintas batas sebagai bagian dari dinamika sosial mereka.

Dalam konteks ini, perdagangan ilegal di perbatasan Timor Leste tidak dapat semata-mata dipandang sebagai tindakan kriminal. Aktivitas ini muncul sebagai bentuk perlawanan terhadap kegagalan negara dalam menjamin kesejahteraan warganya. Bagi masyarakat, praktik ilegal menjadi strategi bertahan hidup sekaligus sarana memenuhi kebutuhan dasar. Seorang warga perbatasan mengungkapkan, “Karena tuntutan perut kami juga berani ilegal... jangan dilihat sisi negatifnya, tapi sedikit positifnya; waktu itu kami berani ilegal karena kesempatan” (Wawancara, 27 Maret 2024).

Repositori Institusi | Universitas Kristen Satya Wacana repository.uksw.edu

Dari keterangan tersebut, tampak bahwa masyarakat menganggap perdagangan ilegal sebagai langkah rasional untuk mengatasi kemiskinan. Aktivitas ini memberikan berbagai keuntungan: (1) pemenuhan kebutuhan pokok dan peningkatan aset rumah tangga; (2) kemampuan membiayai pendidikan anak-anak; serta (3) peningkatan akses terhadap teknologi dan informasi melalui digitalisasi. Sejalan dengan temuan di Afrika Selatan dan Zimbabwe, perdagangan di wilayah perbatasan turut mendorong peningkatan taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat (Patiung & Taus, 2022).

Dengan demikian, praktik perdagangan ilegal di kawasan perbatasan mencerminkan bentuk adaptasi sosial terhadap ketimpangan ekonomi dan lemahnya peran negara dalam penyediaan kesejahteraan. Aktivitas ini, meskipun berada di luar kerangka hukum formal, berfungsi sebagai mekanisme sosial-ekonomi yang membantu masyarakat bertahan hidup dan memperbaiki taraf kesejahteraan keluarga (Beni & Manggu, 2020; Heyman & Ribas-Mateos, 2019). Oleh sebab itu, urgensi perdagangan ilegal tidak hanya terletak pada aspek pelanggarannya, tetapi juga pada peranannya dalam mempertahankan keberlanjutan hidup masyarakat di wilayah perbatasan yang terpinggirkan.

Dampak Perdagangan Ilegal pada Masyarakat Perbatasan

Perdagangan ilegal di kawasan perbatasan antara Timor Leste dan Indonesia menimbulkan sejumlah dampak positif bagi masyarakat lokal. Pertama, kegiatan ini berkontribusi pada peningkatan ekonomi rumah tangga di wilayah perbatasan. Masyarakat yang semula kesulitan memenuhi kebutuhan dasar kini mulai mampu mencukupi kebutuhan hidupnya, bahkan menunjukkan peningkatan kesejahteraan melalui kepemilikan barang elektronik dan kendaraan pribadi. Temuan ini sejalan dengan pandangan Maisondra (2023) bahwa pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan dapat mendorong dinamika sosial dan lingkungan di sekitarnya.

Fenomena serupa juga tercatat di beberapa wilayah lain. Penelitian Wu (2001) mengenai kawasan perbatasan Jerman–Polandia dan China–Vietnam menunjukkan bahwa interaksi lintas batas mampu menciptakan sektor informal yang dinamis, menarik investasi, serta meningkatkan aktivitas perdagangan dan pariwisata. Niebuhr (2016) menegaskan bahwa integrasi ekonomi di wilayah perbatasan dapat mendorong peningkatan pendapatan regional dan penyerapan tenaga kerja, yang secara tidak langsung memperkuat perekonomian masyarakat setempat.

Konteks serupa terjadi di perbatasan Timor Leste–Indonesia, di mana mekanisme ekonomi informal berkembang secara alami dan berfungsi sebagai sistem subsistensi masyarakat. Aktivitas ini bukan bentuk separatisme, melainkan

Repositori Institusi | Universitas Kristen Satya Wacana
repository.uksw.edu

strategi ekonomi untuk bertahan hidup di tengah keterbatasan akses dan minimnya dukungan pemerintah (Rudiatin, 2018; Ayu et al., 2022). Pemerintah lokal pun cenderung menerapkan kebijakan yang lebih longgar karena keterbatasan modal pembangunan dan minimnya intervensi dari pemerintah pusat.

Kedua, perdagangan ilegal turut membuka akses masyarakat terhadap pendidikan. Pendapatan dari aktivitas lintas batas memungkinkan orang tua membiayai anak-anak mereka hingga ke perguruan tinggi, termasuk sekolah kepolisian dan seminari Katolik. Fenomena ini memperlihatkan perubahan sosial yang signifikan, di mana keluarga yang sebelumnya miskin kini mampu melahirkan generasi terdidik dan berpotensi menjadi agen perubahan di komunitasnya.

Kondisi geografis perbatasan yang berbukit, terpisah oleh selat dan sungai, serta keterbatasan infrastruktur transportasi (Susiati, 2022), menjadikan perdagangan lintas batas sebagai alternatif rasional dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dengan demikian, meskipun ilegal secara formal, praktik perdagangan ini berfungsi sebagai mekanisme ekonomi yang memperkuat daya tahan masyarakat terhadap kemiskinan dan keterisolasian.

Peluang dan Tantangan Perdagangan Ilegal Masyarakat di Perbatasan Timor Leste

Kepentingan nasional suatu negara tidak dapat dilepaskan dari aktivitas perdagangan internasional yang menjadi bagian penting dalam politik luar negeri, terutama di kawasan perbatasan (Elyta, 2017). Melalui kegiatan perdagangan lintas negara, pemerintah berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat perbatasan sekaligus memperkuat perekonomian lokal. Namun, pengembangan ekonomi kawasan ini harus diimbangi dengan pengelolaan keamanan yang kerap menjadi isu sensitif (Mulya, 2020). Untuk menjadikan wilayah perbatasan sebagai beranda depan yang produktif dan berinteraksi positif dengan negara tetangga, dibutuhkan komitmen dari seluruh pihak—pemerintah pusat dan daerah, legislatif, dunia usaha, masyarakat adat, serta pemangku kepentingan lainnya. Perdagangan dan investasi menjadi elemen penting yang menandai dinamika perbatasan menuju konsep dunia tanpa batas (Niko & Samkamaria, 2019).

Meskipun demikian, pembangunan ekonomi perbatasan tidak mudah diwujudkan (Niko, 2016). Ketidaksiapan negara dalam menyediakan kebijakan yang adaptif seringkali mendorong munculnya praktik perdagangan ilegal. Di kawasan perbatasan Indonesia–Timor Leste, aktivitas ini berkembang akibat lemahnya pengawasan dan kekosongan hukum yang membuka ruang bagi masyarakat untuk melakukan transaksi lintas batas secara tidak resmi. Kemudahan akses antarwilayah dan keuntungan ekonomi yang diperoleh

Repositori Institusi | Universitas Kristen Satya Wacana repository.uksw.edu

menjadikan praktik ini sebagai sumber penghidupan utama bagi sebagian warga. Bagi mereka, aktivitas perdagangan tersebut bahkan dianggap sebagai bentuk kemandirian ekonomi yang membawa kesejahteraan nyata.

Transformasi pola ekonomi masyarakat perbatasan dari sistem barter menjadi jual beli juga menandai perubahan nilai sosial-ekonomi di wilayah ini. Pada awalnya, pertukaran barang dilakukan atas dasar solidaritas sesama warga yang dahulu berada dalam satu kesatuan wilayah. Namun seiring waktu, tumbuh kesadaran akan nilai komoditas, khususnya barang bernilai tinggi seperti bahan bakar dan hasil pertanian (Mamiloto, 2017). Kesadaran ini mendorong masyarakat beralih ke mekanisme jual beli untuk memperoleh keuntungan finansial dan memenuhi kebutuhan pendidikan maupun kesehatan keluarga.

Salah seorang pelaku perdagangan di wilayah perbatasan mengungkapkan bahwa transaksi ilegal menjadi alternatif untuk menjaga stabilitas ekonomi keluarga meskipun harus menghadapi risiko hukum. Akses geografis yang terbuka memperkuat dinamika sosial dan ekonomi di perbatasan, menjadikannya ruang yang terus berkembang secara etnografis dan ekonomi. Namun, peningkatan aktivitas ilegal akhirnya mendorong pemerintah memperketat regulasi, yang ironisnya justru memperburuk kondisi ekonomi warga. Banyak dari mereka kemudian kembali menggunakan "jalan tikus" agar dapat mempertahankan sumber pendapatan, meskipun hal itu berisiko penangkapan dan kehilangan mata pencaharian.

Fenomena ini memperlihatkan dilema struktural: masyarakat harus memilih antara kepatuhan hukum atau pemenuhan kebutuhan hidup. Ketiadaan jaminan kesejahteraan dari negara mendorong mereka mencari solusi secara mandiri, bahkan di luar jalur formal. Pola tindakan semacam ini dapat dipahami melalui konsep *everyday maker* (Bang et al., 2014; Truelove & Cornea, 2021; Newman, 2005), yakni partisipasi warga dalam tata kelola kehidupan sehari-hari tanpa keterlibatan langsung dalam politik formal. Dalam konteks ini, perdagangan ilegal di kawasan perbatasan dipahami sebagai strategi adaptif masyarakat untuk bertahan hidup dan menegosiasikan kesejahteraan di tengah keterbatasan kebijakan negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang hidup di kawasan perbatasan antarnegara umumnya berada dalam kondisi sosial ekonomi yang terbatas dan identik dengan kemiskinan struktural. Kondisi ini disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia serta terbatasnya

Repositori Institusi | Universitas Kristen Satya Wacana
repository.uksw.edu

pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia. Data lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat hanya mengenyam pendidikan dasar, bahkan tidak sedikit yang tidak menyelesaikan sekolah dasar. Rendahnya tingkat pendidikan ini berdampak pada minimnya pilihan pekerjaan, sehingga mayoritas penduduk bekerja sebagai buruh dengan penghasilan yang rendah dan tidak menentu.

Dalam konteks tersebut, praktik perdagangan ilegal yang dilakukan masyarakat perbatasan dapat dipahami sebagai bentuk respons atau "perlawanan ekonomi" terhadap krisis kesejahteraan yang tidak mampu diatasi oleh pemerintah Timor Leste pasca-pemisahan dari Indonesia. Aktivitas ini menjadi strategi adaptif masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup, meningkatkan taraf ekonomi keluarga, serta memberikan akses pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak mereka. Bagi sebagian masyarakat, kegiatan ini bahkan menciptakan rasa kemandirian ekonomi dan pengalaman "kemerdekaan" yang nyata karena mampu keluar dari tekanan kemiskinan.

Namun, ketika praktik tersebut semakin meluas, pemerintah kemudian menetapkan regulasi yang bertujuan menekan aktivitas perdagangan ilegal. Ironisnya, kebijakan tersebut justru mempersempit ruang ekonomi masyarakat dan menyebabkan penurunan pendapatan yang signifikan. Sebagai akibatnya, warga kembali mencari jalan alternatif, termasuk menggunakan jalur tidak resmi, agar tetap dapat menjalankan aktivitas ekonomi.

Penelitian ini masih terbatas pada identifikasi peluang dan tantangan dalam praktik pasar ilegal di wilayah perbatasan tanpa mengeksplorasi solusi yang dapat ditawarkan, baik dari sisi kebijakan pemerintah maupun peran masyarakat sipil. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lanjutan yang berfokus pada model tata kelola ekonomi perbatasan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berbasis pada kebutuhan masyarakat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Ana Susiati (2022) 'Analysis of migration phenomenon and urban bias in Indonesia', *Formosa Journal of Sustainable Research*, 1(7), pp. 1029–1040. doi: 10.55927/fjsr.v1i7.2227.

Arsyad, M., Nuddin, A., Fahmid, I.M., Salman, D., Pulubuhu, D.A.T., Unde, A.A., Djufry, F. and Darwis (2020) 'Agricultural development: Poverty, conflict and strategic programs in country border', *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 575(1). doi: 10.1088/1755-1315/575/1/012091.

Ayu, V.K., Yunanda, W.W. and Nulhakim, F. (2022) 'Strategi meningkatkan sistem keamanan di daerah perbatasan dengan jaringan logistik yang terintegrasi', *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), pp. 1219–1233.

Bang, H.P., Sørensen, E., Sharpe, P.M.E. and Sørensen, E. (2014) 'The everyday maker: A new challenge to democratic governance', *Scandinavian Political Studies*, 21(3), pp. 325–341.

Beni, S. and Manggu, B. (2020) 'Efektivitas program keluarga harapan dalam penanggulangan kemiskinan di perbatasan', *Sosio Konsepsia*, 9(2), pp. 162–170.

Benjamin, N., Golub, S. and Mbaye, A.A. (2015) 'Informality, trade policies and smuggling in West Africa', *Journal of Borderlands Studies*, 30(3), pp. 381–394. doi: 10.1080/08865655.2015.1068203.

Creswell, J.W. (2016) *Research design: Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran* (4th ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Elly Kuntjorowati, S.P. (2017) 'Upaya masyarakat perbatasan antarnegara dalam mempertahankan kesejahteraan sosial', *Jurnal PKS*, 16, pp. 345–358.

Elyta (2017) 'Perdagangan gula ilegal di wilayah perbatasan Entikong Indonesia dan Malaysia', *Sosiohumaniora*, 19(1), pp. 59–63. doi: 10.24198/sosiohumaniora.v19i1.10747.

Haqiqi, F., Santika, M. and Yusmalina (2021) 'Analisis pengaruh realisasi penerimaan bea masuk terhadap target penerimaan bea masuk (Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya B Tanjung Balai Karimun Periode 2017–2019)', *Jurnal Cafetaria*, 2(1), pp. 48–61. doi: 10.51742/akuntansi.v2i1.282.

Heyman, J. and Ribas-Mateos, N. (2019) 'Borders of wealth and poverty: Ideas stimulated by comparing the Mediterranean and U.S.-Mexico borders', *Archivio Antropologico Mediterraneo*, 21(2), pp. 0–17. doi: 10.4000/aam.2019.

Kanda, A.S. and Nuraeni, S. (2020) 'Fenomena black market (pasar gelap) dalam etika bisnis', *Festival Riset Ilmiah Manajemen & Akuntansi*, 6681(3), pp. 374–383.

Kareth, N.V.J. (2022) 'Penegakan hukum oleh pos lintas batas bagi para pelintas di wilayah perbatasan Papua dan Papua New Guinea', *Balobe Law Journal*, 2(1), p. 27. doi: 10.47268/balobe.v2i1.848.

Maisondra, M. (2023) 'Pembangunan kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan dampaknya terhadap kebijakan keamanan nasional', *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 8(2), pp. 210–225. doi: 10.33701/jipsk.v8i2.3978.

Mamiloto, S. (2017) 'Penegakan hukum terhadap pelanggaran transaksi perdagangan lintas batas pada daerah perbatasan', *Lex Privatum*, 5(8), pp. 49–56.

Miles, M.B. and Huberman, A.M. (2014) *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Mulya, F.R.Q. (2020) 'Pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal dalam upaya peningkatan pendapatan ekonomi rumah tangga di daerah Sota Kabupaten Merauke', *Jurnal Arsitektur dan Planologi*, 10(2), pp. 1–5.

Nchake, M.A., Edwards, L. and Kaya, T.N. (2019) 'The size of the border and product market integration between Lesotho and South Africa: A production–consumption approach', *Journal of African Economies*, 28(1), pp. 70–88. doi: 10.1093/jae/ejy017.

Newman, J. (ed.) (2005) *Remaking governance: Peoples, politics and the public sphere*. Bristol: Policy Press.

Niebuhr, A. (2016) 'Integration effect in border regions – A survey of economic theory and empirical studies', *HWWA Discussion Paper*, Hamburg, p. 18.

Niko, N. (2016) 'Kemiskinan sebagai penyebab strategis praktik human trafficking di kawasan perbatasan Jagoi Babang (Indonesia–Malaysia) Kalimantan Barat', *Prosiding Seminar Nasional INDOCOMPAC*, pp. 515–524.

Niko, N. and Samkamaria, S. (2019) 'Terminal Barang Internasional (TBI) dalam konteks pembangunan ekonomi masyarakat di perbatasan Entikong, Indonesia–Malaysia', *Indonesian Journal of Religion and Society*, 1(2), pp. 104–114. doi: 10.36256/ijrs.v1i2.65.

Patiung, M. and Taus, W. (2022) 'Dampak perdagangan lintas batas terhadap perekonomian masyarakat lokal', *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(1), pp. 94–102.

Popoola, K.O., Oladehinde, G.J. and Animasaun, E. (2021) 'Gender differentials in poverty among migrants in rural border communities of Oyo state, Nigeria', *Acta Universitatis Carolinae, Geographica*, 56(2), pp. 168–181. doi: 10.14712/23361980.2021.11.

Repositori Institusi | Universitas Kristen Satya Wacana
repository.uksw.edu

Prayoga, R. (2022) 'Model integrasi pentahelix dalam pemberdayaan masyarakat wilayah perbatasan', *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 8(3), pp. 293–309.

Rudiatin, E. (2018) 'Border trade agreement dan integrasi ekonomi di perbatasan', *Prosiding*, 60, pp. 1–23.

Sudiar, S., Aurelia, N., Purnawarman, A. and Daniah, R. (2023) 'Pengembangan kawasan perbatasan negara di Apou Kayan', *INOVASI: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Manajemen*, 19(1), pp. 1–15. ISSN 2528-1097.

Tahu, M.E. (2019) 'Upaya pemerintah dalam penanganan perdagangan ilegal di wilayah perbatasan NKRI dan RDTL segmen Motamasin Kabupaten Malaka', *Jurnal Poros Politik*, 3(1), pp. 27–33.

Truelove, Y. and Cornea, N. (2021) 'Rethinking urban environmental and infrastructural governance in the everyday: Perspectives from and of the global South', *Environment and Planning C: Politics and Space*, 39(2), pp. 1–18.

Ulyssea, G. (2020) 'Informality: Causes and consequences for development', *Annual Review of Economics*, 12, pp. 525–546. doi: 10.1146/annurev-economics-082119-121914.

Wilson, R. (2023) 'The isolated states of America: Home state bias and the impact of state borders on mobility', *SSRN Electronic Journal*, 20, pp. 422–508. doi: 10.2139/ssrn.4622020.

Wu, C.T. (2001) 'Cross-border development in a changing world: Redefining regional development policies', in Edgington, D.W., Fernandez, A.L. and Hoshino, C. (eds.) *New Regional Development Paradigm*, Vol. 2. London: Greenwood Press.

Yosada, K.R. (2020) 'Analisis pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah perbatasan Entikong', *JURKAMI: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 5(2), pp. 148–159. doi: 10.31932/jpe.v5i2.867.

Repositori Institusi | Universitas Kristen Satya Wacana
repository.uksw.edu